

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.¹ Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu, oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Semangat demokrasi masyarakat melalui pemilihan legislatif, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara. Pemeluk Islam sebagai mayoritas menjadi target utama dukungan di dalam kampanye politik, hal ini sangat mudah bagi para politisi

¹ Mas'ood. Mochtar. Colin, Mac A. (2018). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal.34

untuk menarik dukungan bila berlatar belakang yang sama. Strategi seperti ini akan terus menerus dilakukan oleh aktor politik selagi masih dianggap ampuh untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Bentuk-bentuk dari politisasi agama yang dilakukan oleh para aktor politik ini mungkin tidak terlihat oleh masyarakat, namun banyak tokoh agama yang dilibatkan dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun daerah.² Memanfaatkan untuk menarik empati masyarakat (khususnya pemeluk agama mayoritas) untuk memberikan dukungan kepada aktor politik dalam konteks ini, aktor politik menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat atau kendaraan politik mengingat agama merupakan komoditi yang laris di ruang publik bahkan privat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini diperburuk dengan masuknya para pemuka agama ke ranah politik sebagai ikon para calon kandidat dan memberikan legitimasi kepada calon-calon tersebut dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran dan Hadis yang sejalan dengan visi dan misinya. Majelis Ta'lim yang merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan khas Islam, kini tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Majelis Ta'lim yang mempunyai peran sentral dalam pembinaan dan meningkatkan kualitas hidup umat yang sesuai dengan ajaran dalam agama Islam.³

² Siti Faridah, „Poltisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu,“ Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 490, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

³ Muhammad Syafar, “Pemberdayaan Komunitas Majelis Ta’lim Di Kelurahan Banten Kecamatan Kesemen Kota Serang”. Jurnal : Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten. (Januari 2020), 41.

Masyarakat yang terlibat didalam Majelis Ta'lim dapat merasakan betapa pentingnya keberadaan lembaga sosial keagamaan ini sebagai sarana pembinaan moral spiritual, serta menambah wawasan keislaman guna meningkatkan kualitas ⁴sumber daya muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Segi sosial Majelis Ta'lim merupakan sarana interaksi dan komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok serta para ulama dan umara.

Majelis Ta'lim memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga dakwah Islam dan lembaga pendidikan non-formal. Sifat fleksibilitas yang ada pada Majelis Ta'lim inilah yang menjadi kekuatan dan daya tarik masyarakat sehingga mampu bertahan dan relevan dalam pendidikan ke-Islaman yang paling dekat dengan masyarakat. Majelis Ta'lim yang paling eksis dan populer dikalangan ibu-ibu pengajian yakni Majelis Ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama, Majelis Ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama semakin berkembang dan banyak bermunculan di setiap lingkungan masyarakat hingga ke pelosok kota, sehingga menjadikan Majelis Ta'lim ini sebagai salah satu target utama bagi aktor politik maupun kepentingan politik guna mencari dukungan didalam kontestasi politik.

Berdasarkan hasil pra-observasi yang penulis lakukan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di sekretariat PAC Majelis Ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama Desa Air Paoh, terdapat 16 Majelis Ta'lim yang tergabung didalam lingkup Pimpinan Anak

⁴ Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim dalam berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1453

Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Desa Air Paoh. Gambaran umum Majelis Ta'lim yang tergabung didalam lingkup Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Desa Air Paoh berdasarkan jumlah anggotanya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Majelis Ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Majelis Ta'lim	Jumlah Anggota
1	MT AT-TAUBAH	36
2	MT ASYIFA	37
3	MT ASALAM	38
4	MT AL-BAROKAH	60
5	MT AL- AMIN STM	34
6	MT AL –MUKLIS	31
7	MT AL –WAHAB	35
8	MT DARUSALAM	56
9	MT MUSLIMIN	37
10	MT MUHAJIRIN LORONG MELATI	45
11	MT AL –KAUSAR	35
12	MT AL-IKHLAS	32
13	MT MUHAJIRIN KAPURAN	34
14	MT AL –AMIN	38
15	MT AL-FURQON	36
16	MT. MUSA SAHRI	23

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas Majelis Ta'lim yang tergabung didalam lingkup Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Desa Air Paoh ini yaitu Majelis Ta'lim yang memiliki anggota paling banyak adalah Majelis Ta'lim Al- Barokah dengan jumlah jamaah sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, sedangkan Majelis Ta'lim yang memiliki anggota paling sedikit adalah Majelis Ta'lim Musa Sahri dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya semacam perhimpunan pada suatu kegiatan Majelis Ta'lim seperti pengajian, tabligh akbar dan yang lainnya, pada kegiatan tersebut terdapat gerakan-gerakan kepentingan politik dikarenakan pada saat ini lagi hangat-hangatnya isu pencalonan Legislatif, kepala daerah dan bahkan presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Pemilihan Legislatif adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya dan mengantisipasi masalah utama serta menjadi mediasi penyelesaian berbagai konflik secara damai, pemilihan legislatif merupakan bagian dari system pemilihan umum (pemilu) yang mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.⁵

Pemilu tahun 2019 anggota majelis ta'lim Muslimat nahdatul ulama hanya menjadi pelengkap dalam sebuah partai politik guna melengkapi peraturan UU No 7 tahun 2017. Undang-Undang tersebut telah mengatur syarat partai politik menjadi peserta pemilu salah satunya adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Diatur pula, dalam daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) juga minimal memuat 30 persen perempuan, baik untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.⁶ Memenuhi persyaratan itu bukan sesuatu yang mudah, sebab pada praktiknya tidak semua parpol melakukan kaderisasi calon legislatif perempuan secara sistematis. Beberapa partai politik bahkan mencari

⁵ Sabungan Sibarani, 'DINAMIKA PEMILIHAN LEGISLATIF', 2016, 11-18.

⁶ Undang-UUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

calon legislatif perempuan di saat-saat akhir pencalonan agar memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang. Tak hanya itu, persentase calon legislatif yang berhasil lolos ke parlemen juga masih jauh di bawah 30 (tiga puluh) persen. Pemilu 2019, misalnya, hanya ada 118 (seratus delapan belas) persen dari 575 (lima ratus tujuh puluh lima) calon legislatif yang berhasil duduk di DPR. Berarti anggota DPR 2019-2024 dari kalangan perempuan baru sebanyak 20,5 persen. Bahkan pada periode sebelumnya hanya 17 persen atau 97 dari 560 anggota DPR adalah perempuan.

Gagasan agama tentang moral dan kesalehan serta tanggung jawab publik jelas selalu muncul dalam pemilu, apalagi ketika organisasi agama bertambah dan level pendidikan relatif lebih tinggi.⁷ Hubungan agama dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penyeimbang manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, sedangkan politik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.⁸ Sarana perkumpulan didalam bidang keagamaan, Majelis Ta'lim yang dijadikan sebagai strategi oleh aktor politik untuk mencari dukungan para jamaah dengan membangun *image* positif.

Berdasarkan uraian diatas, adapun perihal yang mendasari dilakukannya penelitian ini dikarenakan letak geografis dan tingkat eksistensi serta popularitas Majelis Ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama yang tinggi di kalangan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul "Analisis partisipasi politik jamaah majelis ta'lim

⁷ Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle, saiful Mujani, Kesalehan dan Pilihan Politik Memahami Kebangkitan Islam Politik dari Perspektif Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2018), 123

⁸ Jacobus Ranjabar, Penganar Ilmu Poliik Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi, (Bandung : Cv Alfabeta, 2016), 2.

Muslimat Nahdatul Ulama di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada pemilihan legislatif tahun 2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban⁹. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana partisipasi politik jamaah Majelis Ta’li Muslimat Nahdatul Ulama di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu hal yang ingin diperoleh/dicapai setelah penelitian selesai.¹⁰ Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik jamaah majelis ta’lim Muslimat Nahdatul Ulama di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada pemilihan legislatif tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah suatu kegunaan. Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian, sehingga apa yang nantinya akan dicapai

⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012. Hal: 93

¹⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016. Hal: 97

dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan. Kegunaan yang diharapkan bagi penulis dari hasil penelitian karya ilmiah ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang studi ilmu pemerintahan dan memperdalam pemahaman tentang partisipasi politik perempuan pada Majelis Ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan pembaca pada penelitian ini berguna untuk menambah informasi terutama dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik terkait dengan partisipasi politik jamaah majelis ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Pemilihan Legislatif tahun 2024.
- b. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh menjalani perkuliahan.